

**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR I  
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA SAWAHAN**

# **LAPORAN KINERJA TAHUN 2024**



**JI Dinoyo No. 111 Surabaya - 60265**

**Telp. (031) 5665232, Fax. (031) 5665230, Situs: [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)**

**Layanan Pengaduan (021) 1500200 Email: [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id)**

## KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2024 ini disusun sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-26/PJ/2011 tentang Sistem, Bentuk, Isi dan Laporan Rutin di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN Tahun 2024 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan terdiri dari pendahuluan Laporan Kinerja (LAKIN) Tahun 2024, Rencana strategis dan penetapan kinerja Tahun 2024, dan Akuntabilitas kinerja Tahun 2024 sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU) dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK) dalam pencapaian Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.

LAKIN yang telah disusun ini diharapkan dapat memberi informasi tentang potret kinerja yang telah dilakukan dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan yaitu mencapai target penerimaan yang diamanahkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, melalui beberapa program, kegiatan, dan subkegiatan selama tahun 2024.

Semoga apa yang disajikan dalam LAKIN Tahun 2024 ini dapat menjadi pedoman bagi keberhasilan pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2024. Seluruh jajaran keluarga besar KPP Pratama Surabaya Sawahan terus berusaha dan berkomitmen tinggi mencapai kinerja yang ditetapkan dan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Surabaya, 23 Januari 2025

Kepala Kantor,



Ditandatangani secara elektronik

Prima Libriyanto

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF .....	1
BAB I PENDAHULUAN .....	2
Latar Belakang .....	2
Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	3
Sistematika Laporan .....	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA .....	9
Perencanaan Strategis .....	9
Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 .....	10
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	14
A. Capaian Kinerja Organisasi .....	14
1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal.....	15
2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi.....	17
3. Kepatuhan Tahun sebelumnya yang tinggi.....	18
4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif .....	19
5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif .....	19
6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif .....	20
7. Penegakan Hukum yang Efektif .....	21
8. Data dan Informasi yang Berkualitas.....	22
9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif .....	23
10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel.....	24
Rencana Aksi untuk Tahun 2025 .....	25
B. Realisasi Anggaran.....	26
C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	27
D. Kinerja Lain-Lain.....	27
E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja.....	27
BAB IV PENUTUP .....	28

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Tujuan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan tahun 2024 adalah tercapainya peningkatan kualitas pelayanan, dapat membangun masyarakat yang sadar dan peduli pajak serta tercapainya target rencana penerimaan sebesar Rp 1.483.166.601.000,-.

Dari hasil analisa akuntabilitas kinerja diketahui bahwa dalam evaluasi kinerja kegiatan dan analisa sasaran, pencapaian target penerimaan tahun 2024 dapat direalisasikan sebesar Rp 1.486.551.026.344,- atau sebesar 100,23% dari target dengan penjabaran sebagai berikut :

- Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa sebesar Rp 1.341.807.620.000,-
  - Berkontribusi sebesar 90,26% dari penerimaan.
- Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material sebesar Rp 144.747.469.519,-
  - Berkontribusi sebesar 9,74% dari penerimaan.

Dilihat dari nilai capaian ini, keterkaitan kinerja kegiatan dengan sasaran yang telah ditetapkan berhasil dengan cukup baik, hal ini dikarenakan KPP Pratama Surabaya Sawahan berpedoman untuk melaksanakan program kerja, pengembangan SDM, serta mendapat dukungan atasan dan pimpinan dalam bimbingan pelaksanaan kerja. KPP Pratama Surabaya Sawahan berharap di tahun yang akan datang pencapaian sasaran dapat lebih optimal, dan juga perlu memperhatikan langkah-langkah antisipatif yang ditempuh untuk dapat menanggulangi kendala yang mungkin terjadi.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, KPP Pratama Surabaya Sawahan menyusun Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2024 yang merupakan wujud pertanggungjawaban sebagai bagian dari institusi Kementerian Keuangan terhadap publik dan para stakeholders.

Laporan Kinerja KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2024 ini menyajikan informasi mengenai pencapaian Sasaran Strategis pada Tahun Anggaran 2024 yang tercermin dalam capaian IKU Kemenkeu-Three tahun 2024 KPP Pratama Surabaya Sawahan dengan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU). Penyusunan laporan ini mengutamakan prinsip transparansi dan akuntabilitas sehingga pihak yang berkepentingan dapat memperoleh gambaran tentang capaian kinerja yang telah diwujudkan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan dalam mendukung kinerja Kementerian Keuangan selama tahun 2024.

Kami berharap visi DJP “Menjadi Mitra Terpercaya Pembangunan Bangsa untuk Menghimpun Penerimaan Negara melalui Penyelenggaraan Administrasi Perpajakan yang Efisien, Efektif, Berintegritas, dan Berkeadilan” mampu dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh pegawai di lingkungan KPP Pratama Surabaya Sawahan dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai Kementerian Keuangan yaitu, Integritas, Profesionalisme, Sinergi, Pelayanan, dan Kesempurnaan.

Berikut adalah beberapa dasar atau landasan yang mendasari pentingnya penyusunan Laporan Kinerja :

#### ➤ Akuntabilitas

Laporan Kinerja (LAKIN) berfungsi sebagai alat untuk mempertanggungjawabkan kinerja organisasi kepada berbagai pihak yang berkepentingan. Dengan adanya LAKIN, transparansi dan akuntabilitas organisasi dapat terjaga.

- **Evaluasi Kinerja**  
Laporan Kinerja memungkinkan organisasi untuk mengevaluasi pencapaian kinerja yang telah ditetapkan. Dengan membandingkan kinerja aktual dengan target yang telah ditentukan, organisasi dapat mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, serta peluang untuk perbaikan.
- **Pengambilan Keputusan**  
Informasi yang terkandung dalam LAKIN sangat berguna dalam proses pengambilan keputusan strategis. Dengan mengetahui kinerja yang telah dicapai dan kendala yang dihadapi, organisasi dapat merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan jangka panjang.
- **Perbaikan Berkelanjutan**  
Laporan Kinerja mendorong organisasi untuk terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dengan menganalisis data kinerja, organisasi dapat mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan dan mengambil tindakan korektif.
- **Peningkatan Kinerja**  
Laporan Kinerja dapat menjadi alat motivasi bagi pegawai untuk meningkatkan kinerja. Dengan adanya sistem evaluasi kinerja yang jelas, pegawai akan lebih terdorong untuk mencapai target yang telah ditetapkan.
- **Komunikasi Internal dan Eksternal**  
Laporan Kinerja berfungsi sebagai alat komunikasi yang efektif, baik untuk internal organisasi maupun eksternal. Informasi kinerja yang transparan dapat meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan terhadap organisasi.

## **B. Tugas , Fungsi dan Struktur Organisasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 184/PMK.01/2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.01/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, maka Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan, edukasi, pengawasan, dan penegakan hukum Wajib Pajak di bidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Tidak Langsung Lainnya, dan Pajak Bumi dan Bangunan, dan melaksanakan penguasaan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenangnya berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan menyelenggarakan fungsi :

- a. Analisis, penjabaran, dan pencapaian target penerimaan pajak;
- b. Penguasaan data dan informasi subjek dan objek pajak dalam wilayah wewenang KPP;

- c. Pelayanan, edukasi, pendaftaran, dan pengelolaan pelaporan Wajib Pajak;
- d. Pendaftaran Wajib Pajak, objek pajak, dan penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak;
- e. Pengukuhan dan pencabutan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak;
- f. Pemberian dan/atau penghapusan Nomor Objek Pajak secara jabatan;
- g. Penyelesaian tindak lanjut pengajuan/pencabutan permohonan Wajib Pajak maupun masyarakat;
- h. Pengawasan, pemeriksaan, penilaian, dan penagihan pajak;
- i. Pendataan, pemetaan Wajib Pajak dan objek pajak, dan pengenaan;
- j. Penetapan, penerbitan, dan/atau pembetulan produk hukum dan produk layanan perpajakan;
- k. Pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak;
- l. Penjaminan kualitas data hasil perekaman dan hasil identifikasi data internal dan eksternal;
- m. Pemutakhiran basis data perpajakan;
- n. Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan;
- o. Pengelolaan kinerja dan pengelolaan risiko;
- p. Pelaksanaan dan pemantauan kepatuhan internal;
- q. Penatausahaan dan pengelolaan piutang pajak;
- r. Pelaksanaan tindak lanjut kerjasama perpajakan;
- s. Pengelolaan dokumen perpajakan dan non perpajakan; dan
- t. Pelaksanaan administrasi kantor.

### **Struktur Organisasi**

Sejak Saat Mulai Operasi (SMO) tanggal 24 Mei 2021 KPP Pratama Surabaya Sawahan dikelompokkan sebagai KPP Pratama Kelompok I, sehingga KPP Pratama Surabaya Sawahan terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Kepatuhan Internal** mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan kinerja, melakukan pemantauan pengendalian intern, pengujian kepatuhan dan manajemen risiko, internalisasi kepatuhan, penyusunan laporan, pengelolaan dokumen nonperpajakan, serta dukungan teknis pelaksanaan tugas kantor.
- b. Seksi Penjaminan Kualitas Data** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka penjaminan kualitas data melalui pencanan, pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, pengelolaan dan tindak lanjut kerja sama perpajakan, penjaminan kualitas data yang berkaitan dengan kegiatan intensifikasi

dan ekstensifikasi, penerusan data hasil penjaminan kualitas, tindak lanjut atas distribusi data, penatausahaan dokumen berkaitan dengan pembangunan data, dan pelaksanaan dukungan teknis pengolahan data, serta melakukan penyusunan monografi fiskal dan melakukan pengelolaan administrasi produk hukum dan produk pengolahan data perpajakan.

- c. Seksi Pelayanan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pemberian layanan perpajakan yang berkualitas dan memastikan Wajib Pajak memahami hak dan kewajiban perpajakannya melalui pelaksanaan edukasi dan konsultasi perpajakan, pengelolaan registrasi perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, penerimaan, tindak lanjut, dan proses penyelesaian permohonan, saran dan/ atau pengaduan, dan surat lainnya dari Wajib Pajak atau masyarakat, pemenuhan hak Wajib Pajak, serta melakukan penatausahaan dan penyimpanan dokumen perpajakan, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk layanan perpajakan.
- d. Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka pencapaian target penerimaan pajak melalui pelaksanaan pemeriksaan, pelaksanaan penilaian properti, bisnis, dan aset tak berwujud, pelaksanaan tindakan penagihan, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, serta melakukan penatausahaan piutang pajak, dan melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pemeriksaan, penilaian, dan penagihan.
- e. Seksi Pengawasan I** mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan, pengawasan dan pengendalian.
- f. Seksi Pengawasan II, Seksi Pengawasan III, Seksi Pengawasan IV, Seksi Pengawasan V, Seksi Pengawasan VI** masing-masing mempunyai tugas melakukan analisis, penjabaran, dan pengelolaan dalam rangka memastikan Wajib Pajak mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan tindak lanjut intensifikasi dan ekstensifikasi berbasis pendataan dan pemetaan (mapping) subjek dan objek pajak, penguasaan wilayah, pengamatan potensi pajak dan penguasaan informasi, pencarian, pengumpulan, pengolahan, penelitian, analisis, pemutakhiran, dan tindak lanjut data perpajakan,

pengawasan dan pengendalian mutu kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak, imbauan dan konseling kepada Wajib Pajak, pengawasan dan pemantauan tindak lanjut pengampunan pajak, serta melakukan pengelolaan administrasi penetapan dan penerbitan produk hukum dan produk pengawasan perpajakan atas Wajib Pajak Kewilayahan.

- g. Kelompok Jabatan Fungsional** mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### C. Sistematika Laporan

Berkaitan dengan pencapaian tujuan dan sasaran utama, mandat yang diberikan kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan adalah Target Penerimaan Tahun 2024 revisi terakhir adalah sebesar Rp 1.483.166.601.000.-

Untuk melaksanakan tugas yang diberikan, Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan didukung dengan sarana dan prasarana sebagai peran strategis dalam pelaksanaan tugas dan program kerja yang direncanakan, diantaranya :

#### a. Sarana/prasarana

1. Gedung :  
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan menempati Gedung Keuangan Negara II di Jalan Dinoyo No.111 Surabaya
2. Inventaris Kendaraan :
  - Kendaraan Roda dua : 10 unit ( 10 kondisi baik )
  - Kendaraan Roda empat : 7 unit ( 7 unit kondisi baik )
3. Jaringan sistem informasi perpajakan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dengan LAN dan Wireless
4. Perangkat Komputer terdiri dari :
  - Server : 7 unit (kondisi baik)
  - Modem /VSAT : 3 unit (kondisi baik)
  - PC : 192 unit (159 kondisi baik, 2 rusak ringan, 31 rusak berat)
  - Note Book : 23 unit (kondisi baik)
  - Printer : 58 unit (kondisi baik)
  - Switch : 10 unit (kondisi baik)
  - Terminal Server : -
  - Hub : 3 unit (kondisi baik)
  - UPS : 3 unit (kondisi baik)

b. Wilayah Kerja

Wilayah Kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan meliputi:

1. Kecamatan Bubutan :
  - Kelurahan Bubutan
  - Kelurahan Jepara
  - Kelurahan Gundih
  - Kelurahan Alun-alun Contong
  - Kelurahan Tembok Dukuh
2. Kecamatan Sawahan
  - Kelurahan Pakis
  - Kelurahan Putat jaya
  - Kelurahan Banyu Urip
  - Kelurahan Kupang Krajan
  - Kelurahan Petemon
  - Kelurahan Sawahan
3. Kecamatan Asemrowo
  - Kelurahan Genting Kalianak
  - Kelurahan Tambak Sarioso
  - Kelurahan Asemrowo

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi KPP Pratama Surabaya Sawahan tentunya kami memiliki kekuatan dan kelemahan yang jika dianalisa menggunakan metode SWOT, maka akan tersaji data sebagaimana berikut :

**Strength (S):**

1. Sarana/prasarana yang ada sudah cukup memadai dan Sumber Daya Manusia yang ada sangat mendukung.
2. Perundangan-undangan Perpajakan telah memadai.
3. Dana yang tersedia cukup.
4. Sistem yang sudah berjalan baik.

**Weakness (W):**

1. Dengan tidak terjadwalnya waktu mutasi akan sangat berpengaruh terhadap mental dan atau psikologi karyawan.
2. Kurangnya dorongan untuk memberikan inovasi dalam bekerja.

**Opportunities (O):**

1. Perkembangan ekonomi di wilayah Sawahan sangat pesat, sehingga dapat memberikan potensi perpajakan yang cukup baik.
3. Adanya kerjasama dengan pihak lain yang sudah terjalin dengan baik.

**Threat (T):**

1. Banyak Wajib Pajak yang masih lalai dan tidak sadar akan kewajiban perpajakannya.
2. Dengan adanya beberapa Kantor Pelayanan Pajak dalam satu kota Wajib Pajak cenderung memanipulasi data antara Kantor Pelayanan Pajak yang satu dengan Kantor Pelayanan Pajak yang lain, kondisi lingkungan yang semacam ini sangat tidak menguntungkan.

Dari metode tersebut dapat dilihat bahwa ada beberapa hal yang menjadi tantangan yang harus dihadapi KPP Pratama Surabaya Sawahan dalam mencapai tujuannya. Beberapa tantangan tersebut yaitu wajib pajak yang masih lalai atau tidak sadar akan kewajiban perpajakannya, dan adanya sifat Wajib Pajak yang cenderung menggunakan celah perundang-undangan perpajakan dalam hal administrasi Wajib Pajak.

Dari tantangan-tantangan tersebut KPP Pratama Surabaya Sawahan memiliki langkah-langkah strategis dan rencana aksi untuk dapat dilaksanakan dalam upaya mencapai target pajak tahun 2024.

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

#### A. Perencanaan Strategis

Perencanaan kinerja dibuat sebagai bentuk komitmen pencapaian kinerja sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan pada rencana kinerja tahun 2024. Caranya yaitu dengan memanfaatkan sumber daya yang ada meliputi SDM, sarana dan prasarana serta dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sehubungan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Reviu atas Laporan Kinerja, dan sejalan dengan penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran keberhasilan dan implementasi Anggaran Berbasis Kinerja (ABK), maka penetapan kinerja / perjanjian kinerja tersusun dari beberapa komponen yaitu:

1. Sasaran Strategis (SS);
2. Indikator Kinerja;
3. Target Indikator Kinerja.

Sasaran Strategis didefinisikan sebagai pernyataan tentang sasaran yang ingin dicapai (SS bersifat *output/outcome*) atau apa yang ingin dilakukan (SS bersifat proses), atau apa yang seharusnya kita miliki (SS bersifat *input*). Sedangkan yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah alat ukur bagi pencapaian sasaran strategis yang memenuhi kriteria SMART-C yaitu :

1. *Specific* (spesifik),
2. *Measureable* (terukur),
3. *Achievable* (dapat dicapai),
4. *Relevant* (sesuai visi dan misi serta tujuan strategis organisasi),
5. *Time bounded* (memiliki batas waktu pencapaian) dan
6. *Continuously improved* (sesuai perkembangan strategi organisasi)

Untuk mengetahui pencapaian sasaran, perlu ditetapkan indikator kinerja sebagai indikator keberhasilan. Dimana nilai keberhasilan ditentukan oleh realisasi dibandingkan dengan target. Indikator kinerja tersebut secara langsung dan tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan ataupun program dalam pencapaian tujuan dan sasarannya.

## B. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Penyusunan IKU/IKI di seluruh unit DJP disusun oleh Sekretariat Direktorat Jenderal selaku KKO-One dengan melibatkan Direktorat terkait pengampu IKU/IKI. Dalam pembuatan Peta Strategi, SS, dan IKU/IKI KPDJP mempertimbangkan Renstra, Renja, RPJMN, arahan Menteri, dan juga masukan dari Unit Vertikal. Keterlibatan Unit yang dimaksud dalam penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 diantaranya mengirimkan Nota Dinas Usul IKU/IKI Baru, Hapus, maupun Perbaikan.

Sesuai rencana kinerja yang telah disusun maka rumusan sasaran strategis, indikator kinerja dan target Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Utama	
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal	1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak
		1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi	2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)
		2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi	3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif	4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan
		4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif	5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif	6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan
		6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan
		6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu
7	Penegakan hukum yang efektif	7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian

		7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan
		7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan
8	Data dan informasi yang berkualitas	8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan
		8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif	9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebintalan SDM
		9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit
		9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen resiko
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel	10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran

Dukungan Direktorat Jenderal Pajak dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Dengan memperhatikan kerangka dan sasaran ekonomi makro 2020 – 2024, capaian pembangunan 2015 – 2019, dan tantangan perekonomian 2020 – 2024 maka ditetapkan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020— 2024 yaitu ‘Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong-Royong’. Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, dilaksanakan 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

RPJMN tahun 2020 – 2024 telah sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs), 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan beserta indikatornya menjadi bagian dalam 7 (tujuh) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan;
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
4. Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan;
5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
7. Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan dan transformasi pelayanan publik.

Dari 7 Agenda Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020- 2024, masing-masing agenda dijabarkan ke dalam beberapa sasaran yang dicapai melalui beberapa strategi. Kementerian Keuangan mendukung seluruh Agenda Pembangunan dari 7 Agenda Pembangunan dimaksud melalui beberapa strategi yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran pada masing-masing agenda.

Salah satu agenda pembangunan dalam RPJMN yang berhubungan dengan DJP adalah Agenda (1): Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. DJP sebagai bagian dari Kementerian Keuangan, turut mendukung strategi dalam Renstra Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Strategi Kemenkeu yang didukung DJP meliputi:

- a. Memperbaiki iklim usaha dan meningkatkan investasi, melalui fasilitasi kemudahan usaha dan investasi, antara lain: pemberian fasilitasi kepabeanan dan perpajakan; penyusunan peraturan untuk meningkatkan iklim usaha dan investasi melalui Omnibus Law perpajakan yang akan mengatur tentang PPh, PPN, pajak dan retribusi daerah, serta ketentuan umum perpajakan; dan perbaikan peringkat kemudahan berusaha, dan penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- 1) Direktorat Peraturan Perpajakan I
- 2) Direktorat Peraturan Perpajakan II
- 3) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan

- b. Reformasi fiskal melalui pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (core tax system); upaya intensifikasi dan ekstensifikasi baik obyek dan subyek pajak maupun perluasan barang kena cukai; serta penguatan kelembagaan penerimaan negara.

Implementasi arah kebijakan dimaksud, akan dilaksanakan oleh:

- 1) Direktorat Transformasi Proses Bisnis
- 2) Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi
- 3) Direktorat Peraturan Perpajakan I
- 4) Direktorat Peraturan Perpajakan II
- 5) Direktorat Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan
- 6) Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian

Selain itu, terdapat 2 (dua) indikator pada Target Pembangunan dalam RPJMN 2020- 2024 yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Pajak, yaitu:

a. Rasio Perpajakan terhadap PDB.

Badan Kebijakan Fiskal berperan utama dalam pencapaian indikator secara nasional. DJP mendorong pencapaian indikator dengan memperkuat basis penerimaan pajak nasional.

b. Pembaruan sistem inti administrasi perpajakan (Core tax administration system).

DJP mendukung indikator secara langsung melalui pembangunan sistem administrasi perpajakan yang terintegrasi

## BAB III

### AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Capaian Kinerja Organisasi

Gambaran pencapaian Indikator Kinerja Utama KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2024 dapat disajikan dalam tabel berikut ini :

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	Indeks Capaian
<b>Stakeholder Perspective</b>			<b>30,00%</b>	<b>102,68</b>
1	Penerimaan negara dari sektor pajak yang optimal			102,68
1a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak	100,00%	100,23%	100,23
1b-CP	Indeks realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas	100,00%	106,03%	106,03
<b>Customer Perspective</b>			<b>20,00%</b>	<b>101,04</b>
2	Kepatuhan tahun berjalan yang tinggi			101,92
2a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)	100,00%	100,23%	100,23
2b-CP	Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi	100,00%	104,22%	104,22
3	Kepatuhan tahun sebelumnya yang tinggi			100,17
3a-CP	Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengujian Kepatuhan Material (PKM)	100,00%	100,17%	100,17
<b>Internal Process Perspective</b>			<b>25,00%</b>	<b>116,23</b>
4	Edukasi dan pelayanan yang efektif			115,23
4a-CP	Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan	74,00%	88,80%	120,00
4b-N	Indeks kepuasan pelayanan dan efektivitas penyuluhan	100,00%	110,46%	110,46
5	Pengawasan pembayaran masa yang efektif			120,00
5a-CP	Persentase pengawasan pembayaran masa	90,00%	113,50%	120,00
6	Pengujian kepatuhan material yang efektif			117,93
6a-CP	Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan	100,00%	119,74%	119,74
6b-N	Persentase pemanfaatan data selain tahun berjalan	100,00%	120,00%	120,00
6c-N	Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu	100,00%	114,05%	114,05
7	Penegakan hukum yang efektif			112,69
7a-CP	Tingkat efektivitas pemeriksaan dan penilaian	100,00%	120,00%	120,00
7b-CP	Tingkat efektivitas penagihan	75,00%	106,62%	120,00
7c-N	Persentase penyampaian usul Pemeriksaan Bukti Permulaan	100,00%	100,00%	100,00
8	Data dan informasi yang berkualitas			115,29

8a-CP	Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan	100,00%	142,98%	120,00
8b-CP	Persentase penghimpunan data regional dari ILAP	55,00%	61,50%	111,82
<b>Learning &amp; Growth Perspective</b>			<b>25,00%</b>	<b>116,48</b>
9	Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif			112,96
9a-N	Tingkat kualitas kompetensi dan pelaksanaan kegiatan kebhintalan SDM	100,00%	117,50%	117,50
9b-N	Indeks Penilaian Integritas Unit	85,00%	95,33%	112,15
9c-N	Indeks efektivitas implementasi manajemen kinerja dan manajemen risiko	90,00%	98,31%	109,23
10	Pengelolaan keuangan yang akuntabel		0,00%	120,00
10a-CP	Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran	100,00%	120,00%	120,00
<b>Nilai Kinerja Organisasi</b>				<b>109,19</b>

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Nilai Kinerja Organisasi KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2024 adalah 109,19%. Namun angka ini masih bersifat sementara, dikarenakan nilai NKO masih harus dilakukan validasi oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Timur I sebelum akhirnya menjadi nilai NKO final KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2024. Pencapaian NKO 109,19% di tahun 2024 ini mengalami penurunan 3,33% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 112,52%.

Dari seluruh kegiatan untuk pencapaian target penerimaan tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang perlu dikaji dan mendapat perhatian khusus. Adanya kegagalan dan keberhasilan dari kegiatan-kegiatan tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung akan berpengaruh pada proses pencapaian sasaran utama di KPP Pratama Surabaya Sawahan.

## 1. Penerimaan Negara dari Sektor Pajak yang Optimal

### 1.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak

Perbandingan capaian penerimaan pajak 5 tahun terakhir, Pada tahun 2020 realisasi sebesar 94,12%, tahun 2021 realisasi penerimaan pajak sebesar 96,79%, tahun 2022 realisasi penerimaan pajak sebesar 115,14%, tahun 2023 realisasi penerimaan pajak sebesar 106,75%, tahun 2024 realisasi penerimaan pajak sebesar 100,23%. Capaian penerimaan pajak dalam lima tahun terakhir:

Tahun	2020	2021	2022	2023	2024
<b>Target (Rp)</b>	1,506,752,999,000	1,251,936,963,000	1,190,709,804,000	1,184,129,095,000	1,483,166,601,000
<b>Realisasi (Rp)</b>	1,418,170,336,909	1,211,776,962,136	1,009,675,936,800	1,264,018,885,976	1,486,551,026,344
<b>Capaian</b>	94.12%	96.79%	115.14%	106.75%	100.23%

Realisasi Penerimaan pajak Tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.486.551.026.344,- dengan persentase capaian 100,23% dari target yang direncanakan. Tahun ini target bisa dicapai tergolong cukup baik mengingat keadaan pandemi yang tengah melanda Indonesia. Kedepannya, realisasi penerimaan pajak diharapkan terus tumbuh dan memenuhi target yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan sehingga tahun 2024 dapat mencapai realisasi penerimaan pajak sebesar 100,23% adalah sebagai berikut :

- a. Memanfaatkan data potensi dalam Approweb, Apportal, SIDJP, dan data lain untuk digunakan sebagai alat pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- b. Memberikan sosialisasi dan edukasi kepada Wajib Pajak tentang kewajiban perpajakannya
- c. Mengingatkan Wajib Pajak atas keterlambatan pembayaran/ pelaporan pajak
- d. Melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak
- e. Melakukan pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan
- f. Melakukan sosialisasi atas peraturan-peraturan perpajakan baru dan pemanfaatan aplikasi - aplikasi perpajakan secara tepat sasaran

## **1.2. Persentase Realisasi Pertumbuhan Penerimaan Pajak Bruto dan Deviasi Proyeksi Perencanaan Kas**

IKU Persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas memiliki dua komponen yaitu komponen realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dengan porsi 50% dan komponen deviasi proyeksi perencanaan kas dengan porsi 50%.

Realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas KPP Pratama Surabaya Sawahan telah tercapai lebih dari target yang di tentukan dengan persentase pencapaian sebesar 106,03%.

Kegiatan yang dilakukan agar persentase realisasi pertumbuhan penerimaan pajak bruto dan deviasi proyeksi perencanaan kas tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Selalu meningkatkan pelayanan lebih baik dari tahun ke tahun

- b. Melakukan pengawasan pembayaran masa terhadap Wajib Pajak
- c. Melakukan analisa atas kenaikan atau penurunan pembayaran pajak berdasarkan pembayaran pajak tahun sebelumnya
- d. Melakukan kegiatan ekstensifikasi dan pengumpulan data lapangan untuk memperluas basis data

## 2. Kepatuhan Tahun Berjalan yang Tinggi

### 2.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM)

Realisasi Penerimaan pajak dari kegiatan pengawasan pembayaran masa (PPM) tahun 2024 adalah sebesar Rp 1.341.807.620.000,- dengan presentase 100,23% dari target sebesar Rp 1.338.664.285.000,-.

Beberapa kendala dalam pencapaian target ini adalah sebagai berikut :

- a. Masih banyak Data ganda yang belum di *cleansing* dengan SPT dan atau *Data Tax Amnesty*
- b. Banyak dijumpai Alamat yang tidak sesuai dengan domisili atau tempat usaha wajib pajak
- c. Banyak WP yang tidak memenuhi Undangan Konsultasi

Kegiatan yang dilakukan agar Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Pembayaran Masa (PPM) tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Pengawasan kepada wajib pajak terutama kepada wajib pajak yang memanfaatkan insentif perpajakan
- b. Pengawasan kepada wajib pajak terutama kepada wajib pajak yang tidak terdampak Covid 19
- c. Menerbitkan STP bagi wajib pajak yang tidak dan/atau kurang bayar dan kurang lapor

### 2.2. Persentase Capaian Tingkat Kepatuhan Penyampaian SPT Tahunan Pph Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

Target Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh baik WP Badan maupun Orang Pribadi yaitu berjumlah 35.203 Wajib Pajak. KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat mencapai 104,22% atau sejumlah 31.631 Wajib Pajak yang telah menyampaikan SPT Tahunan PPh.

Salah satu kendala dalam pencapaian target ini adalah keterbatasan kontak antara Wajib Pajak dan pegawai KPP Pratama Surabaya Sawahan

dikarenakan adanya pandemi. Hal ini membuat upaya asistensi atau pelaksanaan sosialisasi ke Wajib Pajak kurang maksimal.

Kegiatan yang dilakukan agar Persentase capaian tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Mengirimkan *SMS Blast*, dan *Whatsapp Blast* untuk Himbuan Pelaporan SPT Tahunan 2024
- b. Membuat SK Tim Satgas Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan
- c. Memaksimalkan Pelaksanaan Kelas Pajak Secara *Online*
- d. Memaksimalkan kegiatan edukasi pajak secara tatap muka (*One on One*), termasuk *Helpdesk* Asistensi SPT Tahunan

### **3. Kepatuhan Tahun Sebelumnya yang Tinggi**

#### **3.1. Persentase Realisasi Penerimaan Pajak dari Kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM)**

Realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) adalah sebesar Rp 144.747.469.519,- dengan persentase pencapaian sebesar 100,17% dari target sebesar Rp 144.502.316.000.-

Kegiatan yang dilakukan agar Persentase realisasi penerimaan pajak dari kegiatan Pengawasan Kepatuhan Material (PKM) tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pendalaman dan pengolahan Data Pemicu serta menyandingkan dengan Data Informasi Eksternal
- b. Memanfaatkan data potensi dalam Approweb, Apportal, SIDJP, dan data lain untuk digunakan sebagai alat pengawasan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak
- c. Melakukan *visit* (kunjungan kerja) dalam rangka mengetahui lebih konkrit potensi pajak yang dimiliki oleh Wajib Pajak dan bertemu dengan Wajib Pajak untuk merealisasikan potensi sesuai SP2DK
- d. Memperbanyak analisis komprehensif berbasis SPT Tahunan dan Laporan keuangan untuk menemukan potensi-potensi besar

#### **4. Edukasi dan Pelayanan yang Efektif**

##### **4.1. Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan**

Realisasi Persentase perubahan perilaku lapor dan bayar atas kegiatan edukasi dan penyuluhan tahun 2024 mendapatkan nilai capaian yaitu 120%.

Dari target sebesar 74,00%, dapat terealisasi sebesar 88,80%.

Kegiatan Edukasi dan penyuluhan di KPP Pratama Surabaya Sawahan berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Pegawai KPP Pratama Surabaya Sawahan selalu bersemangat untuk melakukan edukasi baik berupa penyuluhan maupun sosialisasi.

Edukasi yang kami lakukan secara daring juga bisa terselenggara dengan baik berkat adanya kerja sama yang baik dari tim penyuluhan dan bantuan data serta sarana prasarana yang baik pula. selain melakukan kegiatan edukasi dan penyuluhan juga dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan (perubahan perilaku) pada Wajib Pajak peserta edukasi.

##### **4.2. Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan**

Realisasi Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan tahun 2024 mendapatkan nilai capaian yaitu 110,46%. Dari target sebesar 100,00% dapat terealisasi sebesar 110,46%.

Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan diukur dari hasil survei yang dilaksanakan oleh direktorat Jenderal Pajak bekerja sama dengan pihak *surveyor*.

Kegiatan yang dilakukan agar target Indeks Kepuasan Pelayanan dan Efektivitas Penyuluhan dapat tercapai adalah sebagai berikut :

- a. Memberikan pelayanan prima kepada Wajib Pajak
- b. Menerapkan budaya 3 S (Senyum, Salam, Sapa)
- c. Memberikan edukasi kepada Wajib Pajak (melalui layanan TPT, *Helpdesk, Telegram, Email*, dan saluran lainnya) secara maksimal

#### **5. Pengawasan Pembayaran Masa yang Efektif**

##### **5.1. Persentase Pengawasan Pembayaran Masa**

IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa memiliki tiga hal yang perlu diperhatikan yaitu pengawasan terhadap penerbitan STP, pengawasan terhadap dinamisasi angsuran PPh Pasal 25 (Strategis), Penambahan Wajib

Pajak Hasil Ekstensifikasi (Kewilayahan) dan pengawasan terhadap tindak lanjut penyandingan data (*Data Matching*)

KPP Pratama Surabaya Sawahan mendapatkan nilai capaian yaitu 120%. Dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 113,50%.

Salah satu kegiatan yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Surabaya Sawahan dalam mencapai target IKU Persentase Pengawasan Pembayaran Masa adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan pengawasan pembayaran pajak tahun berjalan kepada Wajib Pajak.
- b. Menindaklanjuti data Daftar Sasaran Ekstensifikasi dengan menerbitkan SP2DK DSE dan usulan penerbitan NPWP.
- c. Melakukan penelitian atas data perpajakan dan menindaklanjuti dengan penerbitan SP2DK.
- d. Melakukan penelitian terkait dinamisasi angsuran PPh Pasal 25.

## **6. Pengujian Kepatuhan Material yang Efektif**

### **6.1. Persentase Penyelesaian Permintaan Penjelasan Atas Data dan/atau Keterangan**

Penghitungan capaian IKU penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan dilakukan dengan menambahkan Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis dengan wajib pajak lainnya (berbasis kewilayahan) dengan bobot masing-masing 50%.

Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan Wajib Pajak Strategis tercapai 119,74%, sedangkan untuk Wajib Pajak Lainnya (berbasis kewilayahan) tercapai 119,74%, sehingga apabila digabungkan IKU Persentase penyelesaian permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan KPP Pratama Surabaya Sawahan tahun 2024 tercapai 119,74%.

Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa KPP Pratama Surabaya Sawahan telah melakukan kegiatan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak dalam melakukan pemenuhan kewajiban perpajakannya.

### **6.2. Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan**

Realisasi IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan mendapatkan nilai capaian yaitu 120,00%. Dari target sebesar 100,00% dan dapat terealisasi sebesar 120,00%.

IKU Persentase Pemanfaatan Data Selain Tahun Berjalan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu pemanfaatan data STP dan data Matching.

Persentase Pemanfaatan Data STP adalah persentase perbandingan antara Jumlah Daftar Nominatif STP yang Ditindaklanjuti dengan Jumlah Daftar Nominatif STP yang Seharusnya Ditindaklanjuti.

### **6.3. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu**

#### **Waktu**

Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib pajak KPP adalah kegiatan dalam rangka memastikan pelaksanaan tugas komite kepatuhan pada KPP untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Efektivitas Pengelolaan Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu dihitung dari 30% Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu ditambah dengan 40% kualitas pelaksanaan komite kepatuhan ditambah dengan 30% Persentase penyiapan bahan baku pemeriksaan terhadap target PKM Pemeriksaan.

Persentase Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Kepatuhan Wajib Pajak KPP tepat waktu tercapai 115%, persentase Kualitas Pelaksanaan Komite Kepatuhan tercapai 108,87 dan komponen terakhir yaitu Persentase Penyiapan bahan Baku pemeriksaan terhadap Target PKM Pemeriksaan tercapai 120%, sehingga apabila digabungkan IKU Efektivitas Pengelolaan Komite kepatuhan Wajib Pajak KPP Tepat Waktu tercapai 114,05%.

## **7. Penegakan Hukum yang Efektif**

### **7.1. Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian**

Realisasi IKU Tingkat Efektivitas Pemeriksaan Dan Penilaian KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2024 adalah 120,00% dari target 100% sehingga indeks capaiannya dapat maksimal yaitu 120,00%.

Dari capaian tersebut dapat dilihat bahwa tindakan pemeriksaan di KPP Pratama Surabaya Sawahan sudah sangat efektif dengan langkah-langkah yang sudah dilakukan sebagai berikut :

- a. Melakukan Pemeriksaan sesuai SOP dan apabila terdapat diluar SOP dikoordinasi dengan pimpinan dan Seksi terkait maupun petunjuk dari Kanwil
- b. Melakukan koreksi sesuai dengan dasar dan landasan aturan yang berlaku

## **7.2. Tingkat Efektivitas Penagihan**

Tingkat Efektivitas Penagihan adalah tindakan penagihan pajak aktif yang dilakukan terhadap Wajib Pajak/Penanggu Pajak dalam upaya pencairan piutang pajak. Efektivitas ini diukur melalui variabel persentase realisasi tindakan penagihan yang meliputi Penerbitan Surat Teguran, Pemberitahuan Surat Paksa, Pemblokiran, Penyitaan, Penjualan Barang Sitaan dan Pencegahan.

Target persentase tingkat efektivitas penagihan tahun 2024 adalah 75%, KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat merealisasikan sebesar 103,93%, sehingga KPP Pratama Surabaya Sawahan mendapatkan indeks capaian maksimal yaitu 120,00%.

## **7.3. Persentase Penyampaian Usul Pemeriksaan Bukti Permulaan**

KPP Pratama Surabaya Sawahan mendapatkan nilai capaian yaitu 100%. Dari target sebesar 100% dapat terealisasi sebesar 100%.

Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan berdasarkan pengembangan dan analisis melalui kegiatan intelijen atau kegiatan lain.

Pengembangan dan analisis melalui kegiatan lain dilakukan melalui kegiatan pengawasan, pemeriksaan, pengembangan Pemeriksaan Bukti Permulaan, atau pengembangan Penyidikan, dengan hasil berupa Laporan yang memuat usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus dilakukan Case Building terlebih dahulu dengan Kanwil DJP, baik Kanwil DJP di dalam wilayah kerjanya maupun Kanwil DJP lain yang terkait, untuk memastikan kualitas usulan agar dapat diindaklanjuti dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan yang disampaikan harus memuat informasi minimal yang tercantum dalam formulir usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan.

## **8. Data dan Informasi yang Berkualitas**

### **8.1. Persentase penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan**

Penyediaan data potensi perpajakan di sini adalah data potensi perpajakan berbasis lapangan yang diperoleh dari kegiatan produksi data melalui Kegiatan Pengumpulan Data Lapangan (KPDLD) berupa formulir pengumpulan data.

Penyediaan data potensi perpajakan berbasis lapangan dilakukan untuk memberikan data potensi pajak yang akurat melalui KPDL sehingga data yang diperoleh dan disampaikan tersebut dapat ditindaklanjuti dalam rangka ekstensifikasi maupun intensifikasi guna mendukung kegiatan pengamanan penerimaan pajak.

Dari target 4 Penyelesaian Laporan Kegiatan Pengamatan, KPP Pratama Surabaya Sawahan berhasil menyelesaikan 5.5 laporan (Realisasi 138,00%). Adapaun target 1.164 data potensi perpajakan yang direncanakan untuk disediakan, KPP Pratama Surabaya Sawahan berhasil menyediakan sejumlah 1.728 data (Realisasi 148,45%), dengan ini indeks capaian IKU mencapai 120,00%. Hal ini berarti penyelesaian laporan pengamatan dan penyediaan data potensi perpajakan telah mencapai target dan diharapkan kedepannya dapat menyediakan data perpajakan yang akurat dan lengkap dan memunculkan semangat sinergi antar unit kerja.

## **9. Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif**

### **9.1. Tingkat Kualitas Kompetensi dan Pelaksanaan Kegiatan Kebintalan SDM**

Dari target yang ditetapkan yaitu 100%, KPP Pratama Surabaya Sawahan dapat mencapai realisasi 117,50% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 117,50%. Tingkat kualitas kompetensi SDM mengukur kualitas kompetensi SDM yang meliputi 3 Aspek, yaitu:

Aspek 1: Kualitas kompetensi pejabat yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi manajerial dan sosial kultural pejabat struktural dan pengembangannya;

Aspek 2: Kualitas kompetensi pelaksana dan fungsional yang diukur berdasarkan pemenuhan kompetensi teknis pelaksana dan fungsional serta pengembangannya;

Aspek 3: Pengembangan kompetensi pegawai yang diukur berdasarkan pemenuhan standar jam pelajaran pegawai.

Setiap pegawai harus memenuhi kompetensi yang disyaratkan pada masing-masing jabatan. Kompetensi yang wajib dimiliki oleh setiap pegawai terdiri dari kompetensi manajerial, kompetensi teknis, dan kompetensi social kultural.

### **9.2. Indeks Penilaian Integritas Unit**

Realisasi IKU Indeks Penilaian Integritas Unit mendapatkan nilai capaian

yaitu 112,15%. Dari target sebesar 85,00% dan dapat terealisasi sebesar 95,33%.

IKU ini mengukur Indeks Penilaian Integritas Organisasi dengan cara mengukur tingkat capaian indeks yang bersumber dari 4 komponen utama survei kepada responden eksternal (Wajib Pajak), yaitu sebagai berikut:

1. pelayanan perpajakan;
2. pengawasan kepatuhan;
3. pemeriksaan pajak;
4. penagihan pajak.

### **9.3. Indeks Efektivitas Implementasi Manajemen Kinerja dan Manajemen Risiko**

KPP Pratama Surabaya Sawahan mendapatkan nilai capaian yaitu 109,23%. Dari target sebesar 90% dapat terealisasi sebesar 98,31%.

Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 300/KMK.01/2022 tentang Manajemen Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan, antara lain diatur bahwa:

1. Manajemen kinerja merupakan rangkaian kegiatan mengoptimalkan sumber daya untuk meningkatkan kinerja organisasi dan pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
2. Manajemen kinerja dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.
3. Ruang lingkup manajemen kinerja terdiri atas klasifikasi manajemen kinerja, struktur manajemen kinerja, kerangka kerja sistem manajemen kinerja, dan sistem informasi manajemen kinerja.
4. Klasifikasi manajemen kinerja terdiri atas manajemen kinerja organisasi, yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu, dan manajemen kinerja pegawai yakni manajemen kinerja dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, penugasan lainnya sesuai kebutuhan organisasi, serta perilaku kerja pegawai selama periode tertentu.

## **10. Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**

### **10.1. Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

IKU Persentase kualitas pelaksanaan anggaran bertujuan untuk Mengukur Kualitas Pelaksanaan Anggaran sesuai ketentuan IKPA dan SMART.

Dari target yang ditetapkan yaitu 100%, KPP Pratama Surabaya Sawahan

dapat mencapai realisasi 120,00% sehingga mendapatkan indeks capaian sebesar 120,00%.

Hal-hal yang dilakukan dalam pencapaian IKU ini adalah sebagai berikut :

- a. Pemanfaatan jam kerja secara efektif dan meminimalisir jam lembur
- b. Pembatasan frekuensi dan jumlah peserta perjalanan dinas
- c. Pembatasan pemberian kudapan dan makan siang untuk acara rapat
- d. Pembatasan pemberian honorarium narasumber bagi PNS
- e. Penggunaan Air, Listrik, ATK dan internet yang efisien
- f. Efisiensi pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- g. Review rencana penyerapan/penarikan dana
- h. Review rencana capaian kegiatan output
- i. Melakukan optimalisasi anggaran untuk kebutuhan anggaran kegiatan prioritas yang belum terdani dengan mekanisme revisi DIPA Melakukan efisiensi anggaran belanja Barang Non Operasional dan mengalihkan ke belanja modal

#### **Rencana Aksi untuk Tahun 2025**

- Melakukan himbuan penyampaian SPT Tahunan kepada WP secara intens sebelum bulan Maret baik melalui WA blast, email, dan kerjasama dengan kelurahan dibarengi dengan himbuan validasi NIK menjadi NPWP
- Menyediakan pelayanan dalam bentuk pojok pajak atau pos pelayanan pajak pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat
- Program pendampingan pelaporan SPT dengan mendampingi Wajib Pajak dalam proses pengisian dan pelaporan SPT Tahunan
- Meningkatkan usulan pemeriksaan khusus
- Optimalisasi kegiatan edukasi, pemeriksaan, penagihan dan penegakan hukum
- Usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan dari seksi pengawasan dan FPP per seksi/kelompok pemeriksa 1 usulan
- Pemilihan responden yang lebih dari jumlah minimal dan diprioritaskan pada WP kooperatif dan responsif

## B. Realisasi Anggaran

Rencana Anggaran Tahun 2024 yang tersedia pada Perjanjian Kinerja Kepala KPP Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2024:

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	<b>Rp 1.111.940.000</b>
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 497.095.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 273.263.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 341.582.000
<b>B.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 2.622.944.000</b>
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 1.807.553.000
2.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp 815.391.000
<b>Total</b>		<b>Rp 3.734.884.000</b>

➤ Pagu Revisi Anggaran Tahun 2024:

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Anggaran
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	<b>Rp 1.111.940.000</b>
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 497.095.000
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 273.263.000
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 341.582.000
<b>B.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 2.995.688.000</b>
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.180.297.000
2.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp 815.391.000
<b>Total</b>		<b>Rp 4.107.628.000</b>

➤ Penyerapan Anggaran Program/Kegiatan Tahun 2024:

Program/ Kegiatan Tahun 2024		Realisasi	Presentase
<b>A.</b>	<b>Program Pengelolaan Penerimaan Negara</b>	<b>Rp 1.092.383.094</b>	<b>98,24 %</b>
1.	Ekstensifikasi Penerimaan Negara	Rp 495.409.226	99,66 %
2.	Pelayanan, Komunikasi, dan Edukasi	Rp 266.887.006	97,67 %
3.	Pengawasan dan Penegakan Hukum	Rp 330.086.862	96,63 %
<b>B.</b>	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	<b>Rp 2.960.466.653</b>	<b>98,82 %</b>
1.	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	Rp 2.163.735.653	99,24 %
2.	Pengelolaan organisasi dan SDM	Rp 796.731.000	97,71 %
<b>Total</b>		<b>Rp 4.052.849.747</b>	<b>98,67 %</b>

### **C. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Efisiensi anggaran pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan meliputi realisasi pengeluaran antara lain:

- SBM untuk makan siang (nasi kotak) sebesar Rp 49.000. Realisasi: Rp 25.000 s.d. Rp 40.000
- SBM untuk *snack* sebesar Rp 23.000. Realisasi : Rp 15.000 s.d. Rp 20.000
- SBM untuk biaya transport dalam kota sebesar Rp 150.000. Realisasi: Rp 75.000 s.d. Rp 120.000
- Uang harian perjalanan dinas sebesar 80% dari SBM uang harian perjalanan dinas. Berdasarkan data IKI Indeks Kualitas Pelaksanaan Anggaran, realisasi atas IKU tersebut di tahun 2024 adalah sebesar 120%.

### **D. Kinerja Lain-Lain**

- Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian Keuangan Tahun Anggaran 2022
- Peringkat III Satuan Kerja Terbaik atas Capaian Nilai Indikator Kinerja Penilaian Anggaran Triwulan II TA 2021 Kategori Pagu sampai dengan 10 miliar

### **E. Evaluasi dan Peningkatan Akuntabilitas Kinerja**

Telah dilakukan evaluasi internal oleh Unit Kepatuhan Internal kepada pemilik pengendalian pada organisasi melalui perangkat pemantauan berdasarkan Rencana Pemantauan Tahunan sesuai dengan nota dinas Direktur Jenderal Pajak nomor ND-7/PJ/PJ.11/2024 tanggal 19 April 2024 hal Penyampaian Revisi Rencana Pemantauan Tahunan (RPT) Tahun 2024 di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan Data Indikator Kinerja Individu (IKI) Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan Itjen Tahun 2024, tidak terdapat rekomendasi dari Inspektorat Jenderal sehingga tidak terdapat tidak lanjut dari KPP Pratama Surabaya Sawahan.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah salah satu upaya memberikan gambaran tingkat kegagalan dan keberhasilan setiap program kerja yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran dari tujuan suatu instansi pemerintah secara jelas dan transparan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan pada tahun 2024 pada dasarnya telah berhasil mencapai seluruh sasaran tersebut, bahkan mampu melebihi target penerimaan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dengan tersusunnya LAKIN Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Sawahan Tahun 2024 ini diharapkan menjadi masukan bagi semua pihak yang terkait dengan laporan ini. Perbaikan sangat diperlukan dan diharapkan untuk lebih mengoptimalkan dan mempertahankan capaian penerimaan pajak di tahun mendatang.

Surabaya, 23 Januari 2025

Kepala Kantor



Ditandatangani secara elektronik

Prima Libriyanto